

**REPOSISI KİYAI PESANTREN DALAM DINAMIKA POLITIK**Rahiman Dani<sup>1</sup>Qolbi Khoiri<sup>2</sup>[1 rahimandani@gmail.com](mailto:rahimandani@gmail.com); [2 qolbikhoiri@gmail.com](mailto:qolbikhoiri@gmail.com);<sup>1</sup> Program Pascasarjana Universitas Hazairin Bengkulu; <sup>2</sup> Pascasarjana IAIN Bengkulu**Abstrak**

Tulisan ini bertujuan untuk mengungkap dan menjelaskan mengenai dinamika kiyai pesantren dalam hubungannya dengan politik kebangsaan dan mengulas mengenai reposisi peran kiyai dalam dinamika politik kebangsaan. Meskipun banyak analisa mengenai peran kiyai ini, namun faktanya pasang surut posisi kiyai pesantren semakin terlihat inkonsistensinya. Hal ini dapat dibuktikan dengan keterlibatan kiyai secara praktis dalam politik sehingga berdampak pada eksistensi lembaga pendidikan pesantren yang dikelolanya. Hasil dari analisis penulis menggambarkan bahwa kiyai sudah saatnya untuk kembali pada peran sentralnya sebagai figure utama dalam pengelolaan pesantren, hal ini penting untuk dilakukan agar eksistensi pesantren di era modern tetap terjaga dan fokus pada reformulasi benteng pertahanan akhlak dan moral ummat yang kian mengkhawatirkan. Reformulasi yang penulis tawarkan adalah melalui internalisasi dan adaptasi peradaban modern bagi kiyai dan fokus pada pembenahan di lembaga pendidikannya, baik dalam bidang ekonomi, sosial budaya, maupun teknologi.

Kata Kunci: *Kiyai Pesantren, Dinamika Politik*

**Abstract:** This paper aims to reveal and explain the dynamics of kiyai among national politics and central figure in their institution, this paper also explaining how to repositioning the role of kiyai in the dynamics of national politics. Despite many analyzes of the role of this kiyai, the fact that the tidal position of kiyai is increasingly seen its inconsistency. This can be proved by the involvement of kiyai practically in politics so that it impacts on the existence of pesantren[s] educational institutions that are managed. The results of the author's analysis illustrate that the kiyai is time to return to its central role as the main figure in pesantren management, it is important to be done so that the existence of pesantren[s] in the modern era is maintained and focus on reformulation of moral fortress and morals of the worshiper more worried. Reformulation that the authors offer is through the internalization and adaptation of modern civilization being Kiyai competence, both in the economic, socio-cultural, and technological.

Keyword: *Kiyai at Pesantren[s], dynamics of National Politics*

**A. Latar Belakang**

Tulisan ini mencoba menganalisis dan menjelaskan dinamika posisi kiyai dilembaga pendidikan Islam bernama pesantren. Secara teori Kiyai

menurut Abdurrahman dengan mengutip Chatib Bisri dan Nurcholis Madjid menjelaskan bahwa seseorang dianggap dan diberi julukan Kiyai adalah orang yang memiliki kelebihan dan atau juga pengetahuan keagamaan yang mendalam dibandingkan dengan yang lain.<sup>1</sup> Pada pemahaman lain, Kiyai merupakan figure pemimpin karismatik yang mempunyai kewenangan penuh untuk mengelola pesantren yang didirikannya, Kiyai berperan sebagai perencana, pelaksana dan pengevaluasi terhadap semua kegiatan yang dilaksanakan di pondok pesantren.<sup>2</sup> Peran kepemimpinan Kiyai tidak hanya terbatas pada aspek spiritual, namun juga aspek kehidupan sosial yang lebih luas.<sup>3</sup>

Penggunaan istilah kyai dalam kultur masyarakat Indonesia didapati banyak ragam dalam penyebutannya, namun yang jelas setiap gelar tersebut dapat menunjukkan kelebihan seseorang dalam bidang keagamaan. Beberapa contoh dapat dikemukakan misalnya di daerah Jawa Barat (Sunda) kiyai juga disebut *ajengan*, di Aceh disebut '*Teungku*', di Minangkabau dipanggil '*Buya*', di Makasar '*Tofranrita*', di Madura '*Nun*' atau '*Bendara*' yang biasa disingkat '*ra*', di Lombok dan sekitarnya biasa dipanggil '*Tuan Guru*'. Khususnya di Jawa sebutan kyai biasa disamakan dengan sunan ataupun '*susuhan*',<sup>4</sup>

Berkenaan posisi kiyai di era modern saat ini, terdapat banyak tulisan yang telah mengurai lebih jauh terhadap peran, fungsi, dinamika dan kontribusinya dalam berbagai aspek politik, sosial, kebudayaan dan keagamaan. Dinamika peran serta Kiyai tersebut tergambar dalam berbagai bentuk dan model, termasuk juga posisi. Nursyam dalam makalahnya menjelaskan bahwa posisi kiyai dan juga santri dalam dinamika politik lebih cenderung dimanfaatkan oleh hegemoni politik, hal ini menurutnya dapat dilihat dari perjalanan sejarah panjang bangsa Indonesia. Salah satu sebabnya

---

<sup>1</sup>Abdurrahman, *Fenomena Kiai Dalam Dinamika Politik: Antara Gerakan Moral dan Politik*, Jurnal KARSA, Vol. XV No. 1 April 2009

<sup>2</sup>Zeimek. *Pesantren dan perubahan sosial*. (Jakarta: P3M, 1986)., hlm, 138

<sup>3</sup>Karel A. Steenbrink, *Pesantren, Madrasah, Sekolah* (Jakarta: LP3ES. 1986)., hlm. 109

<sup>4</sup> Ahmad Adaby Darban, *Rifa'iyah: Gerakan Sosial Keagamaan Di Pedesaan Jawa Tengah Tahun 1850-1982*, (Yogyakarta: Program Pascasarjana, 1987)., hlm 29

menurut Syam adalah perbedaan afiliasi politik kyai yang menimbulkan respon beragam dari komunitas masyarakat yang sebelumnya menempatkan kyai sebagai *opinion leader* ataupun referensi utama pengambilan keputusan yang harus ditaati.<sup>5</sup> Sebab kyai juga menyandang sebutan elit pesantren yang memiliki otoritas tinggi dalam menyimpan dan menyebarkan pengetahuan keagamaan.<sup>6</sup>

Lalu yang menjadi persoalan adalah, sejauh mana Kiyai berinteraksi dengan posisi strategisnya untuk digunakan dalam rangka menjaga eksistensi pesantren yang secara nisbi harus berhadapan dengan modernitas, globalisasi dan universalisasi.<sup>7</sup> Peradaban modern saat ini menuntut keterlibatan berbagai pihak dengan menjunjung tinggi profesionalitas termasuk juga Kiyai. Keberadaan kiyai sebagai benteng pertahanan pesantren juga dituntut untuk mampu berperan secara aktif, tidak hanya mengandalkan charisma dan figure yang secara evolutif mulai tergerus oleh energy politik dalam bingkai demokrasi.<sup>8</sup>

## B. Kiyai dalam Dinamika Politik Kebangsaan

Sejarah eksistensi Kiyai dalam perjalanan bangsa Indonesia, bergaris lurus dengan sejarah bangsa Indonesia itu sendiri, hubungan antara Kiyai dan Bangsa Indonesia mengalami pasang surut yang secara dinamis senantiasa berhadapan antara dua kutub yang saling berseberangan dan atau bergandengan.

---

<sup>5</sup> Nursyam, *Kiyai, Santri dan Politik* (Makalah, dalam <http://nursyam.uinsby.ac.id/?p=17>) diakses tanggal 23 Mei 2018

<sup>6</sup> Amir Fadhilah, *Struktur Dan Pola...* hlm. 104

<sup>7</sup> Secara teori modernisme ditunjukkan dengan berbagai istilah diantaranya globalisasi. Jan Aart Scholte misalnya, melihat bahwa ada beberapa hal yang berkenaan dengan globalisasi, yaitu: Internasionalisasi, Liberalisasi, Universalisasi, Westernisasi, Hubungan transplanetari dan supraterritorialitas: Arti kelima ini berbeda dengan keempat definisi di atas. Pada empat definisi pertama, masing-masing negara masih mempertahankan status ontologinya. Pada pengertian yang kelima, dunia global memiliki status ontologi sendiri, bukan sekadar gabungan negara-negara. Lihat dalam Indra Kesuma Nasution. *Dunia Islam di Tangan Globalisasi*. Jurnal Wawasan, Februari 2006, Volume 11, Nomor 3 FISIP USU.

<sup>8</sup> Kyai dan tokoh pesantren sering kali menjadi lahan sasaran para politisi dalam membangun basis dukungan politik. Pada setiap Pemilihan Umum (Pemilu) maka suara kyai dan santri selalu diperebutkan bukan saja oleh partai-partai politik berbasis Islam saja melainkan juga partai-partai politik berbasis nasionalis. Lihat mengenai hal ini dalam Nursyam, *Kiyai, Santri dan Politik*,,

Beberapa peristiwa penting mengenai keterlibatan Kiyai dalam perjuangan bangsa melalui pilihan politiknya mencerminkan betapa kuatnya pengaruh Kiyai bagi keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun demikian, kiyai dalam konteks politik dihadapkan dengan dilematika dimana satu sisi harus menjadi benteng moral dan akhlak sebagai bentuk amar ma'ruf nahi munkar, namun disisi lain menaati pemimpin (pemerintah). Dua posisi ini mengalami pasang surut mulai dari masa penjajahan hingga era reformasi, tidak jarang ditemukan gesekan tajam antara kiyai dan pemerintah namun acapkali ditemukan juga gesekan antar kiyai yang salah satunya dilatari oleh rebutan pengaruh ditengah-tengah masyarakat.

Ketika Orde Baru berkuasa, Kiyai dalam konteks perpolitikan nasional mengalami degradasi peran dan juga terkesan terpinggirkan, bahkan mereka termasuk salah satu kelompok yang kerap dicurigai gerak geriknya, namun hal tersebut tidak menyurutkan Kiyai untuk tetap mengambil sikap dalam pilihan politiknya. Hal ini terlihat pada momentum kampanye pemilu 1977, Kyai Bisyril Syamsuri sebagai salah seorang kiyai NU dan ketua Majelis Pertimbangan Partai PPP, mengeluarkan "fatwa politik", bahwa setiap muslim diharuskan memilih PPP.<sup>9</sup> Fatwa ini berlanjut dengan Walk Outnya sejumlah anggota DPR/MPR dari PPP pada tahun 1978 yang dilatari oleh ketidaksetujuan mereka untuk memberikan tempat terhadap aliran kepercayaan.

Lengsernya orde baru yang ditandai dengan runtuhnya kekuasaan Soeharto pada 21 Mei 1998 membangkitkan kembali ghirah berpolitik para kiyai termasuk juga kiyai dari kalangan pesantren. Hal ini ditandai dengan munculnya kiyai dari pesantren yang terlibat dalam deklarasi pendirian Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang didukung oleh Ormas Nahdhatul Ulama, meskipun akhirnya berdampak pada polarisasi diinternal NU yang sebahagian mereka menyerukan untuk kembali pada Keputusan Mukhtamar di Situbondo yaitu kembali ke Khittah NU 1926. Akibatnya kharisma kiyai secara politik tidak lagi berbarengan dengan kharismanya dibidang sosial kemasyarakatan, sebab NU secara organisatoris menyerahkan sepenuhnya pilihan politik

---

<sup>9</sup> Nursyam, *Kiyai, Santri dan Politik*,,

kepada warganya, sehingga tidak ada afiliasi tunggal dalam berpolitik. Meskipun tidak ada afiliasi tunggal dalam konteks politik, di era reformasi para kiyai tetap berada pada garis keterlibatan politik baik secara pasif maupun aktif. Michael Rush dan Philip Althof menyebutkan bahwa partisipasi dalam bidang politik terdiri dari bentuk pasif dan aktif yang tersusun mulai dari menduduki jabatan dalam organisasi politik hingga kepada memberi dukungan finansial dengan jalan membayar iuran keanggotaan.<sup>10</sup>

Dinamika politik kiyai dalam konstalasi politik praktis dapat ditemukan dalam berbagai momentum politik, baik skala local di daerah melalui Pilkada maupun skala Nasional dalam Pemilihan legislatif maupun Presiden. Contoh yang tampak nyata terlihat dalam Manuver politik yang dilakukan kelompok kiai yang menamakan dirinya Forum Kiai Kampung. Kelompok ini sempat berkirim surat kepada Presiden Jokowi agar segera mengizinkan Khofifah Indar Parawansah (Menteri Sosial) untuk bertarung pada Pilkada Jatim.<sup>11</sup> Pun juga keterlibatan Kiyai secara nasional terjadi pada saat Kongres Kiyai Nusantara di Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak Bantul DIY yang mencantumkan salah satu keputusannya yang dibacakan oleh KH. Hasan Basri (mewakili para kiyai) untuk mengajak seluruh kiai warga NU untuk menyatukan visi dan langkah politik yang memungkinkan NU sebagai kekuatan terbesar Islam *rahmatan lil alamin* di Indonesia bisa mengambil peran sentral dan menentukan dalam politik dan pemerintah Indonesia ke depan dan Mendukung Cak Imin -H. Muhaimin Iskandar- Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) untuk menjadi wakil presiden 2018-

---

<sup>10</sup> Michael Rush & Philip Althof, *Pengantar Sosiologi Politik*, terj. Kartini Kartono (Jakarta: Rajawali Press, 1990), hlm. 128; lihat juga Khamami Zada, "NU, Politik, dan Khidmat Umat" dalam *Nahdlatul Ulama: Dinamika Ideologi dan Politik Kenegaraan*, ed. Khamami Zada dan A. Fawaid Sjadzili (Jakarta: Kompas, 2010), hlm 63.

<sup>11</sup> Lihat di [Kompas.com](https://regional.kompas.com/read/2017/11/19/19115311/manuver-para-kiai-di-panggung-politik-pilkada-jatim) dengan judul ""Manuver" Para Kiai di Panggung Politik Pilkada Jatim", <https://regional.kompas.com/read/2017/11/19/19115311/manuver-para-kiai-di-panggung-politik-pilkada-jatim>. diakses tanggal 23 Mei 2018

2024 agar cita-cita para ulama tentang *baldatun thoyyibatun wa robbun ghofur* tersebut bisa terwujud<sup>12</sup>

Pasang surut peran dan posisi kiyai dalam dinamika politik kebangsaan ini sesungguhnya dapat difahami dalam dua dimensi yang saling berseberangan, pertama. Kiyai sebagai figure sentral dari sebuah lembaga pendidikan Islam diharapkan agar menjaga jarak dari kekuasaan, sebab demokrasi dengan sistim multi partai berdampak pada keberpihakan yang cenderung berakhir terjadinya polarisasi. Figure Kiyai sebagai orang yang dianggap sebagai panutan akan terkikis dengan sistim ini, Kiyai sebagai tokoh panutan seharusnya berdiri di atas semua kekuatan politik, tidak memihak. Meskipun pada akhirnya bermunculan pula pandangan kedua yang mengharapkan kiyai agar tampil dalam kancah politik dalam dimensi High politik, hal ini penting untuk dilakukan, agar Kiyai dapat menjadi penjaga moral dan akhlak serta etika dalam berpolitik.<sup>13</sup>

### C. Menegaskan kembali posisi Kiyai Pesantren

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, term kiyai sesungguhnya memiliki ragam makna, bentuk dan peruntukan. Namun dalam tulisan ini kiyai yang dimaksud adalah sosok/figure kiyai yang berada di Pesantren, karena itulah maka kalimat yang digunakan adalah kiyai pesantren. Kiyai pesantren ini menunjukkan pengertian seseorang yang tercipta melalui proses teologis<sup>14</sup> dan ia merupakan pendiri atau pengelola pesantren.

Diawal telah dikemukakan, bahwa figure kiyai ketika dihadapkan dengan politik akan memunculkan dua pandangan yang berseberangan, bahwa kiyai adalah figure sentral yang secara fungsional berperan sebagai benteng pertahanan moral bila terkoptasi oleh politik maka kemungkinan untuk

---

<sup>12</sup> Lihat di [Kompas.com](https://regional.kompas.com/read/2018/04/01/21431051/sejumlah-kiai-di-diy-beri-dukungan-ke-cak-imin) dengan judul "Sejumlah Kiai di DIY Beri Dukungan ke Cak Imin", <https://regional.kompas.com/read/2018/04/01/21431051/sejumlah-kiai-di-diy-beri-dukungan-ke-cak-imin>.

<sup>13</sup>Lihat lebih jauh mengenai hal ini dalam Merlia Indah Prastiwi, *Politisasi Pesantren Dan Pergeseran Fungsi Pesantren Di Madura*, KARSA: Jurnal Sosial dan Budaya Keislaman Vol. 23 No. 2, Desember 2015: 208-220., hlm. 210

<sup>14</sup> Hamdan Farhan dan Syarifudin, *Titik Tengkar Pesantren: Resolusi Konflik Masyarakat Pesantren* (Yogyakarta: Pilar Religia, 2005), hlm. 65.

independen dan tidak berpihak sangat kecil. Sebaliknya bila kiyai tidak terlibat langsung secara praktis dalam politik, dikhawatirkan tidak dapat menjadi actor pencegah kemungkaran. Penelitian Merlia menunjukkan bahwa pilihan dukungan kepada kiyai didasari bahwa Kiyai yang notabene adalah tokoh agama dinilai bersikap jujur, sehingga jauh dari tindakan korupsi. Selain itu, kiyai juga dipercaya mempunyai akhlak yang mulia sehingga mampu memimpin dengan bijak. Sebaliknya yang menolak keterlibatan kiyai secara praktis dalam politik beralasan bahwa ketika kiai sudah terlibat dalam ranah politik yang sarat dengan pergulatan kepentingan, uang, dan kedudukan, maka kiai tersebut sudah tidak lagi menjadi kiai yang murni diidamkan oleh masyarakat. Kiyai tersebut sudah berada dalam kotak-kotak kepentingan politis yang menginduk pada partai-partai.<sup>15</sup>

Keterlibatan Kiyai dalam struktur partai politik pada satu sisi sesungguhnya sangat menggembirakan, namun disisi lain runtuhnya kehormatan kiyai juga akan sangat mudah terjadi manakala kiyai tersebut terlibat dalam berbagai tindak pidana. Salah satu tindak pidana yang kerap terjadi adalah korupsi, hal ini dialami oleh Walikota Mojokerto yang dikenal sebagai sosok kiyai yang berprestasi dan bersahaja. Selain itu juga keterlibatan kiyai dalam kasus korupsi juga terjadi terhadap bekas bupati Bangkalan dua kali, dan Ketua DPRD Bangkalan.<sup>16</sup> Itulah sebabnya Peneliti Bidang Hukum Indonesia Corruption Warch (ICW) Aradia Caesar mengatakan keterlibatan kiyai atau tokoh agama pada pusran korupsi merupakan bentuk dari gagalnya sistem politik. Dia melihat korupsi telah menysar ke tokoh agama karena adanya pemahaman budaya politik yang keliru di Indonesia, bagaimana partai politik (parpol) mewajibkan kepada kadernya memberikan setoran yang cukup mahal ke partai.<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> Merlia Indah Prastiwi, *Politisasi Pesantren...* hlm. 216

<sup>16</sup> Lihat <http://surabaya.tribunnews.com/2017/11/24/masud-yunus-wali-kota-mojokerto-yang-tersangka-kpk-itu-dikenal-sebagai-kiai-berprestasi> diakses pada tanggal 23 Mei 2018. Juga dapat dilihat <http://poskotanews.com/2016/02/11/terpidana-korupsi-kh-fuad-amin-dari-miliarder-hingga-fakir-miskin/> diakses pada tanggal 23 Mei 2018

<sup>17</sup> Lihat <https://news.okezone.com/read/2015/12/08/337/1263082/para-tokoh-agama-terjerat-korupsi> diakses pada tanggal 23 Mei 2018

Budayawan Acep Zamzam Noor dalam wawancaranya dengan [Republika.co.id](http://Republika.co.id) menjelaskan bahwa terdapat banyak pesantren yang mengalami kemunduruan baik secara kuantitas maupun kualitas disebabkan oleh politik, politik yang dimaksud adalah keterlibatan dan keberpihakan organ pesantren terutama kiyai dalam fatsun politik tertentu sehingga menyebabkan pudarnya kepercayaan masyarakat dengan independensi dan kemandiriannya.<sup>18</sup>

Lebih jauh EH Ismail sebagai keluarga pengasuh Pondok Pesantren Cipasung yang ikut andil dalam penyelesaian konflik sosial di Tasikmalaya tahun 1996 menjelaskan bahwa politik telah mereduksi kepercayaan masyarakat terhadap pesantren, karena selama ini pesantren dipercaya sebagai lembaga yang berdiri di semua kalangan, semua strata, bahkan semua agama. Pesantren diyakini lepas dari setiap kepentingan golongan atau pihak tertentu. Namun kemudian mulai muncul masalah ketika partai-partai politik menjadikan pesantren sebagai obyek politisasi kepentingan tertentu yang bertolak belakang dengan posisi pesantren yang sebelumnya berdiri di tengah-tengah<sup>19</sup> menurutnya sejak 10 tahun terakhir sejak dibukanya era multipartai serta adanya otonomi daerah. Politikus memanfaatkan kalangan pesantren untuk mendulang suara mereka termasuk dengan melibatkan kiyai sebagai pimpinan pesantren, suara pesantren bisa memengaruhi suara masyarakat yang lain.

Berdasarkan fenomena tersebut, maka sudah saatnya kiyai pesantren kembali pada fungsi dasarnya sebagai tokoh dan panutan masyarakat dalam dimensi sosial keagamaan. Memposisikan kembali kiyai pada posisi awalnya bukan berarti menjauhkan mereka dari dinamika politik kebangsaan, melainkan menjaga wibawa dan charisma kiyai sebagai tokoh sentral moral umat yang terbebas dari kepentingan sekelompok orang atau golongan. Penulis memandang bahwa memposisikan kembali kiyai pada gagasan awal

---

<sup>18</sup> <http://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/09/01/02/23865-acep-zamzam-noor-pesantren-rusak-karena-politik> diakses tanggal 24 Mei 2018

<sup>19</sup> <http://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/09/01/02/23865-acep-zamzam-noor-pesantren-rusak-karena-politik> diakses tanggal 24 Mei 2018

berdirinya pesantren, merupakan cerminan dari konsistensi lembaga pesantren untuk mengawal peradaban umat dimasa yang akan datang.

Pesantren terutama kiyai memang tidak bisa lepas dari politik, tapi perlu dipertimbangkan bahwa politik dalam dimensi praktis sarat akan intrik dan kepentingan, sehingga dibutuhkan kecerdasan dan kebijaksanaan kiyai dalam meresponnya dengan strategi *high politik*. Inilah yang diharapkan dapat muncul dalam diri kiyai pesantren yaitu politik yang menurut Amin Rais memiliki tiga ciri yaitu; *Pertama*. Setiap jabatan politik adalah amanah dari masyarakat yang harus dipelihara sebaik-baiknya dan tidak boleh disalahgunakan. Kekuasaan sekecil apapun harus dimanfaatkan dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat. *Kedua*. *High politic* harus difahami bahwa setiap amanah mengandung unsure mas'uliyah, atau pertanggung jawaban (*Accountability*). Hal ini mengandung makna teologis, bahwa setiap amanah akan diminta pertanggung jawabannya dihadapan Allah Swt. *Ketiga*. Kegiatan politik dalam dimensi *high politic* harus berdimensi *ukhuwah Islamiyah*. Berkaitan dengan ini, maka setiap tindakan yang dilakukan harus dalam konteks menjaga hubungan baik yang tidak hanya intra dan ekstra agama, namun melampaui dari itu, termasuk ras, golongan dan etnis.<sup>20</sup>

Berkenaan dengan itu, menelisik sejarah awal berdirinya pesantren yaitu lembaga pendidikan agama Islam yang tumbuh serta diakui masyarakat sekitar, dengan sistem asrama (komplek) di mana santri-santri menerima pendidikan agama melalui sistem pengajian atau madrasah yang sepenuhnya berada di bawah kedaulatan dari *Leadership* seorang atau beberapa orang kiyai dengan ciri-ciri khas yang bersifat kharismatik serta independent dalam segala hal.<sup>21</sup> Maka pesantren dituntut untuk kembali ketujuan semula, dengan tanpa mengabaikan sintuhan politiknya, para kiyai pesantren diharapkan dapat memposisikan dirinya sebagai leader yang memegang prinsip high politik.

Mengenai persoalan praktis dalam politik, hendaknya kiyai menyerahkan persoalan ini secara fungsional kepada instrument dan organ lain

---

<sup>20</sup> Amin Rais, Majalah *Panji Masyarakat*, 1987. hlm. 61

<sup>21</sup> Mujamil Qamar, *Pesantren dari Transformasi Metodologi Menuju Demokratisasi Institusi*, (Jakarta : Erlangga, 2005), hlm. 2

dari masyarakat, hal inilah yang dimaksud oleh Parson dan Merton dalam teori structural fungsional yang menyatakan bahwa susunan masyarakat sebagai bagian tatanan sosial yang mengindikasikan bahwa memiliki hidup harmonis.<sup>22</sup> Fungsionalisme fokus pada struktur sosial yang levelnya makro dalam masyarakat, hal ini juga ia tegaskan bahwa masyarakat sebagai kenyataan objektif individu-individu yang merupakan anggota-anggotanya. Selain itu, teori struktural fungsional sebagai bagian keseimbangan dalam institusi sosial, yang diakuinya akan eksis atau dikenal masyarakat apabila berhasil menjalankan tugas serta fungsinya dengan baik, tanpa memberikan perbedaan sedikitpun.<sup>23</sup> Oleh karenanya, dengan menyerahkan persoalan ini secara fungsional kepada organ lain, maka fungsi kiyai sebagai kordinator dan yang memiliki otoritas sebagai figure sacral dapat tetap terpelihara.

Secara esensial, prinsip-prinsip pokok fungsionalisme<sup>24</sup> adalah: *Pertama*, Masyarakat merupakan sistem yang kompleks yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berhubungan dan saling tergantung, dan setiap bagian tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap bagian-bagian lainnya. *Kedua*, Setiap bagian dari masyarakat eksis karena bagian tersebut memiliki fungsi penting dalam memelihara eksistensi dan stabilitas masyarakat secara keseluruhan, karena itu eksistensi satu bagian tertentu dari masyarakat dapat dijelaskan bila fungsinya bagi masyarakat sebagai keseluruhan dapat diidentifikasi. *Ketiga*, Semua masyarakat mempunyai mekanisme untuk mengintegrasikan dirinya, yaitu mekanisme yang dapat merekatkannya menjadi satu; salah satu bagian penting dari mekanisme ini adalah komitmen para anggota masyarakat kepada serangkaian kepercayaan dan nilai yang sama. *Keempat*, Masyarakat cenderung mengarah kepada suatu keadaan homeostatis, dan gangguan pada salah satu bagiannya cenderung menimbulkan penyesuaian pada bagian lain agar tercapai harmoni dan stabilitas. *Kelima*, Perubahan sosial merupakan kejadian yang tidak biasa

---

<sup>22</sup> George Ritzer. *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda* (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 1992), hlm. 25

<sup>23</sup> George Ritzer, *Teori Sosiologi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), hlm. 178.

<sup>24</sup> Stephen K. Sanderson, *Macro Sociology* (Jakarta, Grafindo, 2000), hlm. 9

dalam masyarakat, tetapi bila itu terjadi, maka perubahan pada umumnya akan membawa kepada konsekwensi-konsekwensi yang menguntungkan masyarakat secara keseluruhan<sup>25</sup>

Selanjutnya hal yang harus difahami oleh kiyai pesantren adalah, bahwa lembaga pendidikan yang dipimpinnya merupakan benteng pertahanan terakhir bagi pembentukan mentalitas dan moralitas bangsa. Meskipun bentuk aslinya masih dipertahankan, namun seiring perubahan zaman dan kemajuan peradaban, pesantren lambat laun harus pula beradaptasi dengan secara sistemik dalam pendidikan Islam modern. Inilah yang diramalkan oleh Steenbrink dengan penyesuaian sistem di lembaga pendidikan pesantren.<sup>26</sup> Dan sebagai benteng pertahanan moral, maka leadership Kiyai juga dituntut untuk dapat menjaga pola edukasi yang menurut dhofier tujuan utama pendidikan pesantren bukanlah mengejar kekuasaan dan uang,<sup>27</sup> melainkan bertujuan untuk penguatan dan pendalaman pada aspke, Ibadah, Penyebaran Ilmu dan Amal serta mewujudkan kehidupan masyarakat yang berlandaskan pada keimanan dan ketakwaan kepada Allah Swt.<sup>28</sup> Di samping itu, tujuan khusus dibentuknya sebuah pondok pesantren adalah mempersiapkan anak didik (santri) untuk menjadi orang alim dalam ilmu agama yang diajarkan oleh kiyai yang bersangkutan, serta mengamalkannya dalam masyarakat.<sup>29</sup>

Ridwan Nasir lebih tegas menyatakan bahwa kualitas dari sistem pendidikan di pesantren sangat tergantung pada kualitas kiyainya, sebab bagaimanapun dalam tradisi pesantren, kiyai adalah lokomotif yang dapat

---

<sup>25</sup> Baca. Ida Zahara Adibah. *Struktural Fungsional Robert K. Merton: Aplikasinya dalam Kehidupan Keluarga*, Jurnal INSPIRASI - Vol. 1, No. 1, Januari-Juni 2017

<sup>26</sup> A. Karel Steenbrink, *Pesantren, Madrasah dan Sekolah: Recente ontwikkelingen In Indonesisch Islamondericht* (Terj. Karel Steenbrink dan Abdurrahman, cet-2 April 1994), hlm. 7

<sup>27</sup> Zamakhsary Dhofier, *Tradisi Pesantren, Studi tentang Pandangan Hidup Kiyai*, (Jakarta: LP3ES, 1994), hlm. 21

<sup>28</sup> Imron Arifin, *Kepemimpinan Kyai dalam Sistem Pengajaran Kitab-Kitab Islam Klasik (Studi Kasus: Pondok Pesantren Tebuireng Jombang)*. Tesis tidak dipublikasikan, (Malang: Program Pascasarjana Universitas Negeri Malang (UM), 1992), hlm. 55.

<sup>29</sup> M. Arifin, *Kapita Selekta Pendidikan Islam dan Umum*, (Jakarta : Bumi Aksara, 1991), hlm, 248

bertindak sebagai actor sosial, mediator, dinamisator, katalisator, motivator sehingga dapat menjawab kebutuhan masyarakat.<sup>30</sup>

#### D. Penutup

Kemajuan dan perubahan zaman merupakan sebuah keniscayaan yang harus dihadapi pesantren, sehingga diperlukan adaptasi dan reformulasi sistem pendidikan yang berlangsung didalamnya. Hal yang paling utama adalah mengembalikan posisi kiyai pesantren pada posisi awalnya sebagai figure sentral pesantren yang bertanggung jawab bagi keberlangsungan pendidikan di pesantren dan tetap menjaga kehormatan pesantren dengan tidak melibatkan diri pada afiliasi politik praktis, sebab jika itu dilakukan maka akan mendistorsi fungsi utama pesantren sebagai penjaga benteng akhlak dan moral. Kesungguhan kiyai pesantren untuk memposisikan dirinya sebagai pimpinan lembaga pendidikan pesantren diwujudkan dengan penguasaan pada aspek keilmuan yang tidak hanya berorientasi pada ukhrowi melainkan juga pada aspek duniawi seperti ekonomi, sosial dan budaya, dan lebih penting lagi pada aspek teknologi.

---

<sup>30</sup> Ridwan Nasir, *Mencari Tipologi Format Pendidikan Ideal: Pondok Pesantren di Tengah Arus Peradaban*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005)., hlm. 7

**DAFTAR PUSTAKA**

Abdurrahman, *Fenomena Kiai Dalam Dinamika Politik: Antara Gerakan Moral dan Politik*, Jurnal KARSA, Vol. XV No. 1 April 2009

Adibah, Ida Zahara. *Struktural Fungsional Robert K. Merton: Aplikasinya dalam Kehidupan Keluarga*, Jurnal INSPIRASI - Vol. 1, No. 1, Januari-Juni 2017

Ahmad Adaby Darban, *Rifa'iyah: Gerakan Sosial Keagamaan Di Pedesaan Jawa Tengah Tahun 1850-1982*, Yogyakarta: Program Pascasarjana, 1987

Dhofier, Zamakhsary. *Tradisi Pesantren, Studi tentang Pandangan Hidup Kiyai*, Jakarta: LP3ES, 1994

Farhan, Hamdan dan Syarifudin, *Titik Tengkar Pesantren: Resolusi Konflik Masyarakat Pesantren* (Yogyakarta: Pilar Religia, 2005), hlm. 65.

<http://surabaya.tribunnews.com/2017/11/24/masud-yunus-wali-kota-mojokerto-yang-tersangka-kpk-itu-dikenal-sebagai-kiai-berprestasi> diakses pada tanggal 23 Mei 2018. Juga dapat dilihat <http://poskotanews.com/2016/02/11/terpidana-korupsi-kh-fuad-amin-dari-miliarder-hingga-fakir-miskin/> diakses pada tanggal 23 Mei 2018

<http://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/09/01/02/23865-acep-zamzam-noor-pesantren-rusak-karena-politik> diakses tanggal 24 Mei 2018

<http://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/09/01/02/23865-acep-zamzam-noor-pesantren-rusak-karena-politik> diakses tanggal 24 Mei 2018

<https://news.okezone.com/read/2015/12/08/337/1263082/para-tokoh-agama-terjerat-korupsi> diakses pada tanggal 23 Mei 2018

Imron Arifin, *Kepemimpinan Kyai dalam Sistem Pengajaran Kitab-Kitab Islam Klasik (Studi Kasus: Pondok Pesantren Tebuireng Jombang)*. Tesis tidak dipublikasikan, (Malang: Program Pascasarjana Universitas Negeri Malang UM), 1992

[Kompas.com](https://regional.kompas.com/read/2017/11/19/19115311/manuver-para-kiai-di-panggung-politik-pilkada-jatim) dengan judul ""Manuver" Para Kiai di Panggung Politik Pilkada Jatim", <https://regional.kompas.com/read/2017/11/19/19115311/manuver-para-kiai-di-panggung-politik-pilkada-jatim>. diakses tanggal 23 Mei 2018

Kompas.com dengan judul "Sejumlah Kiai di DIY Beri Dukungan ke Cak Imin", <https://regional.kompas.com/read/2018/04/01/21431051/sejumlah-kiai-di-diy-beri-dukungan-ke-cak-imin>.

M. Arifin, *Kapita Selekta Pendidikan Islam dan Umum*, Jakarta : Bumi Aksara, 1991

Mujamil Qamar, *Pesantren dari Transformasi Metodologi Menuju Demokratisasi Institusi*, Jakarta : Erlangga, 2005

Nasir, Ridwan. *Mencari Tipologi Format Pendidikan Ideal: Pondok Pesantren di Tengah Arus Peradaban*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005

Nasution. Indra Kesuma. *Dunia Islam di Tangan Globalisasi*. Jurnal Wawasan, Februari 2006, Volume 11, Nomor 3 FISIP USU.

Nursyam, *Kiyai, Santri dan Politik* (Makalah, dalam <http://nursyam.uinsby.ac.id/?p=17>) diakses tanggal 23 Mei 2018

Prastiwi, Merlia Indah. *Politisasi Pesantren Dan Pergeseran Fungsi Pesantren Di Madura*, KARSA: Jurnal Sosial dan Budaya Keislaman Vol. 23 No. 2, Desember 2015: 208-220., hlm. 210

Rais, Amin. *Majalah Panji Masyarakat*, 1987. hlm. 61

Ritzer, George. *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda* (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 1992

\_\_\_\_\_. *Teori Sosiologi* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012

Rush, Michael & Althof, Philip, *Pengantar Sosiologi Politik*, terj. Kartini Kartono Jakarta: Rajawali Press, 1990

Steenbrink, A. Karel. *Pesantren, Madrasah dan Sekolah: Recente ontwikkelingen In Indonesisch Islamondericht* Terj. Karel Steenbrink dan Abdurrahman, cet-2 April 1994

\_\_\_\_\_. *Pesantren, Madrasah, Sekolah* Jakarta: LP3ES. 1986

Stephen K. Sanderson, *Macro Sociology* Jakarta, Grafindo, 2000

Zada, Khamami "NU, Politik, dan Khidmat Umat" dalam *Nahdlatul Ulama: Dinamika Ideologi dan Politik Kenegaraan*, ed. Khamami Zada dan A. Fawaid Sjadzili, Jakarta: Kompas, 2010

Zeimek. *Pesantren dan Perubahan Sosial*. Jakarta: P3M, 1986